

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai merencanakan untuk menjadikan Kecamatan Tidore Timur sebagai salah satu destinasi wisata dengan memanfaatkan potensi hutan mangrove disekitar kelurahan termasuk Mafututu. Namun kawasan hutan mangrove ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan pemerintah. Kawasan hutan mangrove yang mulai dikembangkan untuk dijadikan wisata terletak di Kelurahan Mafututu. Kota Tidore Kepulauan memiliki luas wilayah 9.564,7 km² (Wikipedia, 2012) dengan luas daratan 1.550,37 km² (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2011). Wilayah Kota Tidore Kepulauan meliputi Pulau Tidore dan sepuluh pulau kecil di sekitarnya, serta sebagian wilayah yang berada di Pulau Halmahera. Nama kesepuluh pulau kecil tersebut adalah P. Failonga, P. Mare, P. Maitara, P. Woda, P. Raja, P. Joji, P. Guratu, P. Tamong, P. Tawang dan P. Sibub. Dua pulau yaitu P. Mare dan P. Maitara memiliki luas daratan yang 10km², sedangkan delapan pulau lainnya kurang dari 3 km².

Hiarley (2009) menjelaskan bahwa hutan mangrove merupakan ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang dapat tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut air laut atau air payau, terutama dilaguna dan muara sungai yang terlindung dengan lumpur berpasir. Hutan mangrove merupakan sumber daya alam penting di lingkungan pesisir dan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi fisik, biologis, dan

ekonomis. Fungsi fisik adalah sebagai penahan angin, penyaring bahan pencemar, penahan ombak, pengendali banjir dan pencegah intrusi air laut ke daratan. Fungsi biologis adalah sebagai daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah asuhan (*nursery ground*), dan sebagai daerah mencari makan (*feeding food*) bagi ikan dan biota laut lainnya. Fungsi ekonomis sebagai penghasil kayu untuk bahan bakar baku dan bahan bangunan, bahan makanan dan obat-obatan. Selain itu, fungsi strategis sebagai produsen primer yang mampu mendukung dan menstabilkan ekosistem laut maupun daratan.

Hutan mangrove dengan keunikan yang dimilikinya, merupakan sumberdaya alam yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata yang menarik. Penerapan konsep ekowisata di kawasan hutan mangrove merupakan salah satu pendekatan dalam pemanfaatan ekosistem hutan mangrove secara lestari dan diharapkan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan kawasan tersebut oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi. Ekowisata akan memberikan alternatif wisata dan pendapatan bagi masyarakat. Ekowisata merupakan suatu kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang umumnya dilakukan di daerah yang masih alami. Selain untuk menikmati keindahan alam, ekowisata juga melibatkan unsur-unsur pendidikan, pemahaman, serta dukungan terhadap upaya-upaya konservasi alam dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Menurut Dahuri (2001), Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan luas wilayah sebesar 1,904,569 km² yang terdiri dari 17.508 pulau yang membentang sepanjang 5.120

km dari timur ke barat dengan garis pantai sepanjang 81000 km² dan luas laut 3,1 juta km atau 62% dari luas teritorial Indonesia. Berdasarkan luas kawasan, hutan mangrove Indonesia merupakan hutan mangrove terluas di dunia. Data tersebut di atas menunjukkan betapa besar potensi bahari yang dimiliki Indonesia, baik dari segi ekologis, ekonomi, sosial maupun politik. Negeri kepulauan, selayaknya menjadi negeri maritim yang mampu bersaing dengan dunia global dan mampu mensejahterakan bangsanya.

Dari segi ekologis, negara kepulauan tentu memiliki kekayaan sumber daya alam hayati, baik spesies hewan maupun tumbuhan. Hutan bakau yang tumbuh alami salah satu contohnya merupakan sumber daya alam hayati bagi keseimbangan ekosistem alam, sekaligus perlindungan garis pantai atau wilayah pesisir pantai. Selain itu, aneka ragam ikan yang melimpah, terumbu karang, rumput laut, dan masih banyak lagi, tentunya dapat membawa berkah bagi perekonomian bangsa Indonesia. Sejak di berlakukannya Undang Undang Nomor 22 tentang pemerintahan daerah telah terjadi banyak pola kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dimungkinkan karna Sumber daya alam merupakan modal penting dalam menggerakkan pembangunan di suatu daerah baik dalam konteks negara, provinsi maupun kabupaten, oleh karnanya aspek pemanfaatannya merupakan suatu yang sangat strategis dalam menentukan jumlah penerimaan atau tingkat kontribusinya dalam pembentukan modal pembangunan.

Pengelolaan Sumber daya alam dalam perspektif otonomi daerah pada dasarnya adalah power sharing kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan

provinsi dan kabupaten atau kota. Tumbuhan merupakan bagian yang penting yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah obyek wisata, tumbuhan juga berpengaruh terhadap kondisi udara di sekitarnya semakin banyak tumbuhan maka udara di sekitarnya juga semakin sejuk, desa tongke tongke adalah merupakan kawasan hutan mangrove yang dijadikan sebagai obyek wisata, jenis mangrove yang diswadayakan masyarakat setempat yaitu jenis bakau.

Partisipasi masyarakat seringkali di anggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dengan melihat partisipasi sebagai bagian yang tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat akan dapat diketahui bahwa akar dari perkembangan pemikiran tentang pendekatan partisipatif dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas adalah asumsi bahwa “Masyarakat bukanlah kumpulan orang yang bodoh yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah atau (instruksi) belaka. Partisipasi masyarakat yang di maksud di sini dalah adanya keikut sertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat lebih menjadi lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan. Sebaliknya bila masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perubahan dan hanya bersikap pasif dalam setiap

perubahan yang direncanakan, partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan dalam hal ini, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memapukan (*enable*) masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengamil keputusan sendiri trntang alternatif pemecahan masalah apa yang mereka ingin pilih. disini Chambers menggambarkan bahwa "kita" (perilaku perubahan) berpartisipasi dalam proyek "mereka" (masyarakat lokal) sehingga terjadi apa yang di sebut dengan proses pemberdayaan masyarakat.

Hutan mangrove sebagai suatu ekosistem mempunyai potensi keindahan alam dan lingkungan berupa komponen penyusun ekosistem yang terdiri vegetasi, biota atau organisme asosiasi, satwa liar dan lingkungan sekitarnya. Fungsi lingkungan yang diperoleh dari hutan mangrove antara lain sebagai habitat, daerah pemijahan, penyedia unsur hara, dan lain sebagainya. Hutan mangrove juga merupakan areal tempat penelitian, pendidikan dan ekowisata (Pratama, 2017).

Pengelolaan ekosistem hutan mangrove dengan perlibatan masyarakat merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan berbagai kepentingan (pemerintah dan masyarakat), ilmu pengetahuan dan pengelolaan, dan kepentingan sektoral dan masyarakat umum. Pengelolaan berbasis masyarakat disini adalah bahwa penggunaan dari sumberdaya yang utama yaitu masyarakat dan harus menjadi aktor pengelola sumberdaya tersebut. Keterkibatan masyarakat diperlukan untuk kepentingan pengelolaan secara

berkelanjutan pada sumberdaya, dan pada umumnya kelompok masyarakat yang berbeda akan berbeda pula dalam kepentingannya terhadap sumberdaya tersebut. Pengelolaan sumberdaya tidak akan berhasil tanpa mengikut sertakan semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Suatu pembangunan berbasis masyarakat dapat terbentuk, jika ada suatu kelompok berkolaborasi, karena mereka sadar tidak dapat mengerjakan suatu tugas sendiri-sendiri dan tidak dapat mencapai tujuan secara individual baik karena sifat dari tugas atau tujuan itu sendiri, maupun karena keterbatasan sumber-sumber. Kebersamaan dan kesamaan dalam perhatian, kepedulian, biasanya membuat masyarakat bersatu. Jika kebersamaan itu melembaga, dan menimbulkan kesetiakawanan, rasa saling percaya, terciptanya aturan-aturan main, maka inilah dasar dari terbentuknya basis masyarakat. Sehingga strategi yang tepat perlu dilakukan untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi lingkungan pesisir melalui partisipasi aktif dan bentuk nyata dari masyarakat pesisir itu sendiri. Adanya partisipasi dari masyarakat merupakan hal yang penting dalam upaya pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat. Banyak program dan kegiatan pengelolaan yang kurang berhasil dikarenakan pelaksanaan program yang gagal melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal program.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove pada dasarnya adalah upaya melibatkan masyarakat agar secara sadar dan aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan mangrove. Keterlibatan dapat terwujud apabila seseorang merasa

bahwa keikutsertanya dapat memberikan manfaat bagi dirinya, dimana manfaat tersebut tidak hanya dalam bentuk fungsi hutan mangrove yang sifatnya dirasakan dalam jangka pendek. Berdasarkan hasil analisis faktor partisipasi dan pengelolaan hutan mangrove yang terdapat di Kelurahan Mafututu.

Hutan mangrove di Kelurahan Mafututu ini sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk dijadikan kawasan ekowisata. Hal ini dilihat dari beberapa fasilitas yang sudah disediakan oleh masyarakat berupa jembatan dari bambu untuk menyusuri hutan mangrove. Selain jembatan, adapula fasilitas berupa menara bambu yang dapat digunakan untuk melihat keindahan hutan mangrove dari ketinggian dan pondok ditengah hutan mangrove dan di pesisir pantai. Secara administratif, Kota Tidore Kepulauan terdiri dari 8 Kecamatan yaitu 4 kecamatan berada di Pulau Tidore dan pulau-pulau kecil disekitarnya baik Tidore Utara, Tidore Selatan, Tidore Timur dan Kecamatan Tidore sementara 4 kecamatan lainnya terletak di Pulau Halmahera yakni Kecamatan Oba, Oba Selatan, Oba Utara dan Oba Tengah. (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2011). Di Kecamatan Oba Utara, terletak Sofifi yang merupakan ibukota definitif provinsi Maluku Utara.

Sebaran mangrove terluas terdapat di Pulau Tidore yaitu seluas 11.883,75 Ha. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan luas keseluruhan daratan, Pulau Maitara memiliki persentase luas mangrove terbesar yaitu 2,05%. Mangrove di Pulau Tidore hanya menempati 0,08% dari keseluruhan luas daratan pulau tersebut. Kondisi yang tidak jauh berbeda terdapat di Pulau Ternate, dengan 0,08% mangrove menempati daratan pulau.

Kelurahan Mafututu adalah salah satu kelurahan yang berada di Kota Tidore Kepulauan dengan luas wilayah geologisnya 944.14 km² dengan populasi penduduk mencapai 1.773 jiwa. Kelurahan Mafututu berbatasan dengan Kelurahan Tosa yang berada disebelah Utara dan disebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jiko Cobo, sebelah Timur berbatasan dengan lautan, dan disebelah barat berbatasan dengan permukiman penduduk. hutan mangrove di Kelurahan Mafututu selama ini pengelolaannya belum maksimal, hal ini dilihat dari masih kurang adanya penyediaan fasilitas sarana dan prasaran penunjang di kawasan wisata. Ini dilihat dari beberapa fasilitas yang sudah rusak namun tidak ada perbaikan dan kurang adanya pengadaan fasilitas sarana dan prasaran dalam menunjang hutan mangrove untuk dijadikan kawasan ekowisata. Untuk itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove. Hal ini karena masyarakat merupakan pihak atau orang yang paling dekat dengan kawasan hutan mangrove dan yang paling bisa diharapkan dalam pengelolaan hutan mangrove.

Berdasarkan dari latar belakang diatas tentang pengelolaan hutan mangrove yang berada di Kelurahan Mafututu. Untuk itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore kepulauan**”.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai dasar dalam penelitian ini, maka masalah penelitian ini perlu diidentifikasi sebagai berikut :

1. Minimnya pengetahuan warga masyarakat Kelurahan Mafututu mengenai pengelolaan hutan mangrove.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Mafututu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka, rumusan penelitian yang dijadikan dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka, beberapa poin manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan menjadi acuan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Dapat menambah informasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang berada di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan.

b. Bagi masyarakat umum

Dapat memberikan informasi baru dan membuka pandangan masyarakat bahwa pentingnya pengembangan objek wisata pantai serta pengaruhnya terhadap wisatawan lokal maupun di sekitar tempat wisata pantai.

